

Lampiran A

KERANGKA LOGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2015 – 2019
TINGKAT MAKRO

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	
					Jangka Pendek (Prioritas)	Jangka Menengah
<p>A. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif. 2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis. 3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja. 4. Peningkatan <i>fairness</i>, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa. 	Mental Aparatur	<p>A. Revolusi Mental Aparatur</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kepuasan masyarakat/publik atas pelayanan pegawai ASN 	<p>Survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>Indeks Integritas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan untuk mendorong pengembangan budaya kerja positif 2. Pencanaan budaya kerja positif secara nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif; 2. Penguatan budaya integritas, budaya kinerja dan budaya melayani 3. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif. 4. Pengembangan Budaya pelayanan 5. <i>Public campaign</i> untuk mendorong peran serta masyarakat sebagai unsur pengawas 6. Penerapan Sistem Integritas Nasional melalui internalisasi nilai-nilai integritas, penegakan kode etik dan kode perilaku, penanganan konflik kepentingan, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, sistem <i>whistleblowing</i>, penanganan gratifikasi dan transparansi 7. Penerapan agen perubahan pada instansi pemerintah

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	
					Jangka Pendek (Prioritas)	Jangka Menengah
	Pengawasan	B. Penguatan Sistem Pengawasan	a. Meningkatnya Instansi Pemerintah yang memperoleh Opini WTP dari BPK; b. Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan;	Opini WTP Tingkat Kapabilitas APIP Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	1. Penyelesaian RUU Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Kebijakan Revitalisasi Peran APIP; 3. Pengembangan sistem pengaduan nasional yang terintegrasi.	1. Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong sinergi antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum 2. Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong peningkatan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan 3. Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus; 4. Perumusan Kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan KKN, seperti <i>whistleblowing system</i> , penanganan gratifikasi, pengaturan konflik kepentingan; 5. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
	Akuntabilitas	C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah,	Instansi Pemerintah dengan Akuntabilitas Kinerja Baik	1. Penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja; 2. Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja 3. Pelaksanaan pelaporan kinerja instansi	1. Perumusan dan penetapan kebijakan penerapan sistem <i>reward and punishment</i> dalam penerapan manajemen kinerja nasional 2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	
					Jangka Pendek (Prioritas)	Jangka Menengah
					pemerintah secara terbuka;	berbasis Teknologi Informasi 3. Perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja 4. Perumusan kebijakan mengenai pengukuran kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
B. Birokrasi yang efektif dan efisien 1. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya. 2. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis. 3. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis <i>e-Government</i> . 4. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan	Kelembagaan	D. Penguatan Kelembagaan	a. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi, sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik.	% K/L/P yang tepat fungsi dan tepat ukuran Indeks Kelembagaan	1. Audit Kelembagaan K/L/LNS; 2. Evaluasi Kelembagaan K/L/P; 3. Penataan Kelembagaan K/L; 4. Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah; 5. Penyempurnaan Instrumen Evaluasi Kelembagaan; 6. Penyusunan Instrumen Audit Kelembagaan	
	Tatalaksana	E. Penguatan Tatalaksana	a. Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif	% K/L/P yang ketatalaksanaan baik	1. Penyusunan kebijakan administrasi pemerintahan;	1. Penyempurnaan Instrumen Evaluasi Ketatalaksanaan;

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	
					Jangka Pendek (Prioritas)	Jangka Menengah
<p>berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.</p> <p>5. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.</p> <p>6. Peningkatan kualitas kebijakan publik.</p> <p>7. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif.</p> <p>8. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.</p> <p>9. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.</p>			<p>dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik;</p> <p>b. Terwujudnya ketatalaksanaan yang berbasis elektronik yang menyeluruh dan terpadu;</p>	<p>Indeks Tata Laksana</p> <p>Indeks e-Government</p>	<p>2. Penguatan kebijakan ketatalaksanaan untuk mendorong proses bisnis birokrasi yang sederhana, cepat, dan terintegrasi;</p> <p>3. Kebijakan tentang efektivitas dan efisiensi kerja</p> <p>4. Kebijakan tentang implementasi e-Government yang terpadu</p>	<p>2. Evaluasi ketatalaksanaan K/L/P;</p> <p>3. Penyusunan Instrumen Evaluasi Penerapan e-Government;</p> <p>4. Evaluasi penerapan e-Government.</p>
	SDM Aparatur	F. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	a. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur;	Indeks Profesionalitas	<p>1. Penguatan Sistem remunerasi berbasis kinerja;</p> <p>2. Penguatan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN);</p> <p>3. Penguatan sistem informasi kepegawaian nasional;</p> <p>4. Pengembangan sistem pengukuran Profesionalitas SDM.</p>	<p>1. Penguatan perencanaan pegawai berdasarkan suksesi (<i>succession plan</i>);</p> <p>2. Pembangunan Sistem Rekrutmen berbasis kompetensi yang dilakukan secara transparan, kompetitif, dan berbasis TIK;</p> <p>3. Perumusan kebijakan sistem pengelolaan karier ASN;</p> <p>4. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem penggajian ASN dan pensiun PNS;</p> <p>5. Perumusan dan penetapan kebijakan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja;</p> <p>6. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center;</p> <p>7. Perumusan dan penetapan kebijakan tentang penyusunan</p>

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	
					Jangka Pendek (Prioritas)	Jangka Menengah
						<i>talent pool</i> untuk pengkaderan kepemimpinan; 8. Penjaminan pelaksanaan merit system dalam Manajemen ASN; 9. Pengukuran efisiensi dan efektivitas penerapan manajemen SDM ASN; 10. Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong terciptanya manajemen ASN.
	Peraturan Perundang-undangan	G. Penguatan Peraturan Perundang-undangan	a. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik		1. Penguatan kebijakan untuk mendorong pembentukan Forum Konsultasi Publik dalam perumusan kebijakan; 2. Penguatan kebijakan untuk mendorong pengembangan <i>website</i> yang berinteraksi dengan masyarakat; 3. Penguatan kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik.
C. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas 1. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan: a. Implementasi UU Pelayanan Publik b. Pemanfaatan ICT	Pelayanan Publik	H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; b. Meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik.	Hasil survey kepuasan masyarakat Jumlah inovasi pelayanan Hasil evaluasi kinerja	1. Menyusun kebijakan tentang survey kepuasan masyarakat; 2. Mendorong pelaksanaan kebijakan survey kepuasan masyarakat; 3. Melakukan evaluasi atas hasil survey kepuasan masyarakat; 4. Membuka ruang	1. Penguatan kebijakan untuk mendorong forum konsultasi publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengembangan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses dengan bahasa yang mudah dipahami

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	
					Jangka Pendek (Prioritas)	Jangka Menengah
c. Integritas dan kualitas SDM Pelayanan d. Budaya pelayanan e. <i>Quick Wins</i> 2. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik. a. Penguatan money kinerja b. Efektivitas pengawasan c. Sistem pengaduan d. Penerapan <i>reward and punishment</i>				penyelenggarapelayanan public Indeks integritas pelayanan public Persentase tingkat kepatuhan K/L/P dalam pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik Tindak lanjut pengaduan pelayanan public <i>Public Service Index</i>	partisipasi publik melalui <i>Citizen Charter</i> ; 5. Kompetisi inovasi pelayanan publik; 6. Penyusunan kebijakan tentang inovasi pelayanan publik; 7. Pelaksanaan penilaian inovasi pelayanan publik; 8. Penyusunan kebijakan pelayanan publik; 9. Sosialisasi dan bimbingan teknis; 10. Pelaksanaan survey indeks integritas pelayanan publik; 11. Penerapan kebijakan pelayanan publik; 12. Perumusan kebijakan tentang penanganan pengaduan pelayanan; 13. Penanganan pengaduan pelayanan; 14. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan; 15. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; 16. Perumusan kebijakan; 17. Bimbingan teknis kebijakan dan metode survey.	dan pengembangan <i>website</i> yang berinteraksi dengan masyarakat; 2. Penyelarasan kebijakan ttg penilaian kepatuhan K/L/P dalam pelaksanaan UU 25 th 2009 ttg Pelayanan Publik; 3. Penguatan kebijakan untuk mendorong penerapan manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi yang efektif pada setiap unit pelayanan publik.
		I. Quick Wins Nasional	a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1. Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental Bidang Aparatur Negara 2. Penetapan Organisasi Kementerian Kabinet Kerja Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel 3. Penguatan Manajemen ASN Yang Transparan,	

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	
					Jangka Pendek (Prioritas)	Jangka Menengah
			pelayanan publik		<p>Kompetitif, Berintegritas, Dan Berbasis Merit</p> <p>4. Penuntasan Permasalahan Khusus Rekrutmen ASN</p> <p>5. Percepatan Operasionalisasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Untuk Memperkuat Penerapan Sistem Merit Dalam Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi</p> <p>6. Penilaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Seluruh K/L Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>7. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional Untuk Mengakselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>8. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dan Integritas Instansi Pemerintah Melalui Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Terhadap Unit Kerja Pelayanan Pada K/L Dan Pemda Yg Telah Menganangkan Zona Integritas, Serta Penerbitan Kebijakan Tentang Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja</p> <p>9. Peningkatan Efektifitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui</p>	

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	
					Jangka Pendek (Prioritas)	Jangka Menengah
					Penerbitan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Tentang Penghematan Kegiatan Operasional, Penggunaan Sarana dan Prasarana, dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri	

Lampiran B

KERANGKA LOGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2015 – 2019
TINGKAT MESO

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	
					Jangka Pendek (Prioritas)	Jangka Panjang
<p>Birokrasi yang efektif dan efisien</p> <p>1. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya.</p>	Mental Aparatur	A. Manajemen Perubahan	a. Meningkatnya komitmen K/L dan Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi;	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik	<p>1. Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong peningkatan komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi;</p> <p>2. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional untuk mendorong perubahan mental (pola pikir dan budaya kerja) birokrasi;</p> <p>3. Identifikasi berbagai praktik terbaik;</p> <p>4. Penyelenggaraan Forum Pertukaran Pengetahuan praktik terbaik;</p> <p>5. Dokumentasi praktik terbaik;</p> <p>6. Diseminasi praktik terbaik;</p> <p>7. Identifikasi kebutuhan sosialisasi;</p> <p>8. Penyusunan bahan sosialisasi;</p> <p>9. Pelaksanaan sosialisasi;</p> <p>10. Pelaksanaan <i>public campaign</i>;</p> <p>11. Pelaksanaan <i>coaching clinic</i>;</p> <p>12. Pelaksanaan pendampingan aktif pada instansi pemerintah atau pemerintah daerah tertentu;</p> <p>13. Pemberian konsultasi pelaksanaan reformasi birokrasi.</p>	<p>1. Internalisasi secara berkelanjutan</p>

Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program-program	Hasil yang diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	
					Jangka Pendek (Prioritas)	Jangka Panjang